



HANJAR SATUAN PENDIDIKAN  
**CORE 1 MANAJEMEN STRATEGIK**  
PENGAMBILAN KEPUTUSAN TEKNIS-TAKTIS DAN  
PERANCANGAN SKENARIO OPERASI

untuk

PENDIDIKAN PENGEMBANGAN UMUM  
SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN PERTAMA

SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN POLRI  
2026

## DAFTAR ISI

<b>MODUL</b>	<b>PENGAMBILAN KEPUTUSAN TEKNIS–TAKTIS DAN PERANCANGAN SKENARIO OPERASI</b>	
	Pendahuluan.....	1
	Standar Kompetensi .....	2
	Kompetensi Dasar .....	2
	Materi Pelajaran .....	3
	Metode Pembelajaran.....	4
	Alat/Media, Bahan dan Sumber Belajar .....	5
	Kegiatan Pembelajaran .....	6
	Tagihan / Tugas .....	7
	Lembar Kegiatan .....	7
	Bahan Bacaan .....	8
	<b>POKOK BAHASAN 1</b>	
	<b>KONSEP, MODEL DAN FAKTOR YANG MEMENGARUHI AKURASI PENGAMBILAN KEPUTUSAN TAKTIS</b>	
	A. Konsep dasar pengambilan keputusan taktis .....	8
	B. Model pengambilan keputusan taktis .....	10
	C. faktor-faktor yang mempengaruhi akurasi pengambilan keputusan taktis .....	13
	D. Pilar kualitas keputusan: legalitas, akuntabilitas, dan officer safety.....	14
	<b>POKOK BAHASAN 2</b>	
	<b>DASAR PENGAMBILAN KEPUTUSAN</b>	
	A. Analisis situasi cepat ( <i>rapid situation assessment</i> ) .....	18
	B. Identifikasi dan perumusan akar permasalahan utama .....	21
	C. Perumusan asumsi operasional dan kendala.....	24

D. Analisis dan identifikasi kendala dan batasan (hukum, SDM, logistik) yang mungkin dihadapi dalam operasi .....	26
E. Pengembangan opsi tindakan pilihan.....	27
F. Analisis dan pemilihan opsi terbaik .....	31
G. Pengembangan dan evaluasi pilihan aksi I (COA) .....	34

### **POKOK BAHASAN 3**

#### **PERANCANGAN SKENARIO DAN MEKANISME KOMANDO PENGENDALIAN (C2)**

A. Penyusunan skenario taktis dan rencana operasi (ren ops) ..	38
B. Skenario taktis (peta pergerakan, penempatan kekuatan, urutan tindakan) yang detail dan mudah dipahami oleh anggota.....	41
C. mekanisme komando dan pengendalian ( <i>command and control</i> - C2).....	47
D. Perancangan prosedur kontinjensi (plan B).....	48
Rangkuman .....	50
Latihan .....	51

## MODUL

# PENGAMBILAN KEPUTUSAN TEKNIS-TAKTIS DAN PERANCANGAN SKENARIO OPERASI



28 JP (1.260 Menit)




## PENDAHULUAN


Keberhasilan sebuah operasi kepolisian di tingkat kewilayahan tidak hanya bergantung pada ketersediaan sumber daya manusia dan kelengkapan logistik, melainkan pada ketajaman pengambilan keputusan oleh perwiranya di tengah tekanan lapangan yang dinamis. Dalam realitas operasional, seorang pemimpin taktis sering kali dihadapkan pada situasi yang disebut sebagai *fog of war*—sebuah kondisi ketidakpastian informasi di mana data yang tersedia sering kali tidak lengkap, simpang siur, atau kontradiktif, sementara waktu yang tersedia untuk bertindak sangat terbatas. Modul ini dirancang untuk membekali para perwira dengan kerangka berpikir sistematis guna mengubah keraguan menjadi tindakan yang presisi, legal, dan akuntabel.

Fokus utama dalam modul ini adalah mengintegrasikan kematangan kognitif dengan keterampilan teknis. Melalui penguasaan model pengambilan keputusan, baik yang bersifat analitis-rasional maupun intuitif seperti *Recognition Primed Decision (RPD)*, perwira diharapkan mampu mengenali pola ancaman secara cepat tanpa mengabaikan aspek keselamatan personel (*officer safety*) dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Pengambilan keputusan taktis dalam institusi Polri bukanlah sekadar memilih opsi tindakan, melainkan sebuah proses diskresi yang harus selaras dengan koridor hukum dan moral guna menjamin legitimasi institusi di mata publik.


Lebih jauh lagi, modul ini mengarahkan perwira untuk mentransformasikan keputusan tersebut ke dalam sebuah skenario operasi yang terstruktur. Perancangan skenario yang efektif melibatkan visualisasi pergerakan pasukan secara spasial serta urutan tindakan (*sequence of events*) yang terperinci dalam dimensi waktu. Dengan memahami mekanisme Komando dan Pengendalian (C2) serta menyusun prosedur kontinjensi yang matang, seorang perwira tidak hanya siap untuk menjalankan rencana utama, tetapi juga memiliki

	resiliensi untuk beradaptasi ketika situasi di lapangan berubah secara tidak terduga. Modul ini adalah jembatan yang menghubungkan teori manajemen dengan efektivitas tindakan nyata di lapangan.
--	---


	<b>STANDAR KOMPETENSI</b>
	Mampu mengambil keputusan teknis–taktis yang cepat, tepat, akuntabel, serta mampu merancang skenario operasi kepolisian yang efektif, adaptif, dan sesuai ketentuan hukum dalam rangka penyelesaian masalah Kamtibmas pada tingkat kewilayahan.

	<b>KOMPETENSI DASAR</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami prinsip, model, dan faktor-faktor yang mempengaruhi akurasi pengambilan keputusan taktis.. <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Indikator hasil belajar:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mendefinisikan konsep dasar pengambilan keputusan taktis.</li> <li>b. Menerapkan model pengambilan keputusan taktis.</li> <li>c. Menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi akurasi pengambilan keputusan taktis.</li> <li>d. Menguraikan pilar kualitas keputusan: legalitas, akuntabilitas, dan officer safety</li> </ol> </li> </ul> </li> <li>2. Menguasai dasar pengambilan keputusan. <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Indikator hasil belajar:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan analisis situasi cepat (<i>rapid situation assessment</i>).</li> <li>b. Mengidentifikasi dan merumuskan akar permasalahan utama.</li> <li>c. Merumuskan asumsi operasional dan kendala.</li> <li>d. Menganalisis dan mengidentifikasi kendala dan batasan (Hukum, SDM, Logistik) yang mungkin dihadapi dalam operasi.</li> </ol> </li> </ul> </li> </ol>


	<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Mengembangkan opsi tindakan pilihan.</li> <li>f. Menganalisis dan memilih opsi terbaik.</li> <li>g. Mengembangkan dan mengevaluasi pilihan aksi I (COA).</li> </ul> <p>3. Merancang skenario dan mekanisme komando pengendalian (C2).</p> <p><b>Indikator hasil belajar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun skenario taktis dan rencana operasi (Ren Ops).</li> <li>b. Merancang skenario taktis (peta pergerakan, penempatan kekuatan, urutan tindakan) yang detail dan mudah dipahami oleh anggota.</li> <li>c. Menetapkan mekanisme komando dan pengendalian (<i>command and control/C2</i>).</li> <li>d. Merumuskan prosedur kontinjensi (rencana B) untuk menghadapi perubahan situasi yang tidak terduga (<i>contingency plan</i>).</li> </ul>
--	--


	<p><b>MATERI PELAJARAN</b></p> <p>1. <b>Pokok Bahasan 1:</b> Prinsip, model, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan serta akurasi pengambilan keputusan di lapangan operasional.</p> <p><b>Sub Pokok Bahasan 1:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. dasar pengambilan keputusan taktis.</li> <li>b. model pengambilan keputusan taktis.</li> <li>c. faktor-faktor yang mempengaruhi akurasi pengambilan keputusan taktis.</li> <li>d. pilar kualitas keputusan: legalitas, akuntabilitas, dan officer safety.</li> </ul>
---	---

	<p><b>2. Pokok Bahasan 2:</b> Dasar pengambilan keputusan.</p> <p><b>Sub Pokok Bahasan 2:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. analisis situasi cepat (<i>rapid situation assessment</i>).</li> <li>b. akar permasalahan utama.</li> <li>c. asumsi operasional dan kendala</li> <li>d. kendala dan batasan (Hukum, SDM, Logistik) yang mungkin dihadapi dalam operasi.</li> <li>e. opsi tindakan pilihan.</li> <li>f. opsi terbaik.</li> <li>g. pilihan aksi I (COA).</li> </ol> <p><b>3. Pokok Bahasan 3:</b> Skenario dan mekanisme komando pengendalian (C2).</p> <p><b>Sub Pokok Bahasan 3:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. skenario taktis dan rencana operasi (Ren Ops).</li> <li>b. skenario taktis (peta pergerakan, penempatan kekuatan, urutan tindakan) yang detail dan mudah dipahami oleh anggota.</li> <li>c. mekanisme komando dan pengendalian (<i>command and control/C2</i>).</li> <li>d. prosedur kontinjensi (rencana B) untuk menghadapi perubahan situasi yang tidak terduga (<i>contingency plan</i>).</li> </ol>
--	---


	<p style="text-align: center;"><b>METODE PEMBELAJARAN</b></p> <p><b>1. Metode Ceramah</b> Metode ini digunakan untuk menjelaskan materi tentang pengambilan keputusan teknis–taktis dan perancangan skenario operasi.</p> <p><b>2. Metode <i>Brainstroming</i> (curah pendapat)</b> Metode ini digunakan untuk menggali pendapat/pemahaman peserta tentang materi yang disampaikan.</p>
---	---


	<p><b>3. Pembelajaran Kooperatif (<i>Cooperative Learning</i>)</b></p> <p>Metode ini digunakan untuk mendorong interaksi sosial, saling ketergantungan positif, dan pengembangan keterampilan sosial serta kognitif melalui kerja sama dalam kelompok.</p> <p><b>4. Metode <i>Problem Based Learning</i></b></p> <p>Metode ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah dengan pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pemecahan masalah sebagai cara untuk mengembangkan pemahaman konsep dan keterampilan kritis.</p> <p><b>5. Metode <i>Project Based Learning</i></b></p> <p>Metode ini bertujuan untuk mengembangkan proyek yang signifikan, yang menekankan pada pemecahan masalah, kolaborasi, dan keterampilan praktis.</p> <p><b>6. Metode Penugasan</b></p> <p>Metode ini bertujuan untuk menugaskan peserta didik untuk membuat resume terkait materi yang disampaikan.</p>
--	---


	<p><b>ALAT/MEDIA, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR</b></p>
	<p><b>1. Alat/Media:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Whiteboard.</i></li> <li>b. <i>Flipchart.</i></li> <li>c. Komputer/laptop.</li> <li>d. LCD dan <i>screen.</i></li> <li>e. <i>Laser point.</i></li> <li>f. Pengeras suara/<i>sound system.</i></li> </ol> <p><b>2. Bahan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kertas.</li> <li>b. Alat tulis.</li> </ol> <p><b>3. Sumber Belajar</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Paparan Pendidik.</li> </ol>

	<h2>KEGIATAN PEMBELAJARAN</h2>
	<p><b>1. Tahap awal : 10 menit</b></p> <p>Pendidik melakukan apersepsi, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Membuka kelas dan memberikan salam.</li> <li>b. Perkenalan.</li> <li>c. Pendidik menyampaikan tujuan dan materi yang akan disampaikan dalam proses pembelajaran.</li> </ol> <p><b>2. Tahap inti : 1.240 menit</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <b>Tahap inti I: pembahasan pengambilan keputusan teknis–taktis dan perancangan skenario operasi. (240 menit)</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pendidik (Narasumber didampingi Widyaiswara) mengeksplor pengalaman terkait pengambilan keputusan teknis–taktis dan perancangan skenario operasi.</li> <li>2) Pendidik (Narasumber didampingi Widyaiswara) memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk merumuskan pengambilan keputusan teknis–taktis dan perancangan skenario operasi..</li> </ol> </li> <li>b. <b>Tahap inti II: diskusi materi pengambilan keputusan teknis–taktis dan perancangan skenario operasi. (1.000 menit)</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pendidik (Widyaiswara) menugaskan peserta didik melalui Pokjar masing-masing untuk mendiskusikan tentang pengambilan keputusan teknis–taktis dan perancangan skenario operasi.</li> <li>2) Pendidik (Widyaiswara) menunjuk salah satu Pokjar untuk mempresentasikan hasil diskusi dan ditanggapi oleh Pokjar lain.</li> <li>3) Pendidik (Widyaiswara) memberikan ulasan dan penguatan materi pengambilan keputusan teknis–taktis dan perancangan skenario operasi.</li> <li>4) Pendidik (Widyaiswara) menugaskan peserta didik secara perorangan untuk membuat resume dan laporan hasil diskusi materi pengambilan keputusan teknis–taktis dan perancangan skenario operasi.</li> </ol> </li> </ol>

	<p><b>3. Tahap akhir : 10 menit</b></p> <p>Pendidik (Widyaiswara) mengakhiri kegiatan pembelajaran, yang mencakup kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan penguatan materi, dengan cara memberikan ulasan dan penguatan materi secara umum.</li> <li>b. Menjelaskan keterkaitan mata pelajaran dengan pelaksanaan tugas.</li> <li>c. Menyampaikan tindaklanjut dari kegiatan pembelajaran dalam bentuk penugasan dan sebagainya.</li> </ol>
--	--

	<p><b>TAGIHAN / TUGAS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta didik mengumpulkan laporan hasil diskusi Pokjar terkait materi yang disampaikan.</li> <li>2. Peserta didik mengumpulkan tugas NKP 1 sesuai dengan PPKT dalam bentuk pdf di <i>upload</i> ke aplikasi SIAP.</li> </ol>
---	---

	<p><b>LEMBAR KEGIATAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan hasil diskusi Pokjar terkait materi yang disampaikan.</li> <li>2. Resume dengan tulisan tangan sesuai dengan PPKT.</li> </ol>
---	---

	<b>BAHAN BACAAN</b>
	<p><b>POKOK BAHASAN 1</b></p> <p><b>KONSEP, MODEL DAN FAKTOR YANG MEMENGARUHI AKURASI PENGAMBILAN KEPUTUSAN TAKTIS</b></p> <p><b>A. Konsep Dasar Pengambilan Keputusan Taktis</b></p> <p>1. Hakekat Pengambilan Keputusan Taktis</p> <p>Pengambilan keputusan taktis merupakan proses menentukan tindakan paling tepat dalam situasi lapangan yang bersifat dinamis, tidak pasti, dan sering berada di bawah tekanan waktu tinggi. Keputusan ini berada pada level terdepan pelaksanaan tugas kepolisian dan secara langsung berdampak terhadap keselamatan masyarakat, personel, serta legitimasi institusi Polri.</p> <p>Berbeda dengan keputusan strategis dan operasional yang memiliki ruang perencanaan lebih panjang, keputusan taktis menuntut respons cepat, adaptif, dan kontekstual terhadap peristiwa yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, pengambilan keputusan taktis tidak hanya bergantung pada aturan tertulis, tetapi juga pada kemampuan perwira dalam membaca situasi, menilai risiko, serta mengintegrasikan pengalaman dan pengetahuan profesional.</p> <p>Keputusan Strategis (Mabes/Polda): Berfokus pada kebijakan jangka panjang, penetapan visi, alokasi anggaran makro, dan penentuan sasaran prioritas nasional. Contoh: Penetapan Operasi Lilin secara nasional.</p> <p>Keputusan Operasional (Polres): Berfokus pada pengelolaan sumber daya untuk mencapai target strategis di wilayah kabupaten/kota. Contoh: Penentuan plotting personel di seluruh titik keramaian kota.</p> <p>Keputusan Taktis (Polsek/Lapangan): Berfokus pada tindakan konkret dan segera di lapangan untuk menyelesaikan masalah spesifik saat itu juga.</p> <p>Esensi Keputusan Taktis: “<i>The right action, at the right place, at the right time.</i>” Artinya, ketepatan tindakan (prosedur), lokasi (posisi taktis), dan waktu (momentum)</p>

	<p>adalah penentu keberhasilan. Kesalahan pada salah satu elemen ini dapat menyebabkan kegagalan operasi atau jatuhnya korban.</p> <p>Secara konseptual, pengambilan keputusan taktis berjalan dalam siklus dinamis yang dikenal sebagai OODA Loop (<i>Observe–Orient–Decide–Act</i>). Siklus ini menggambarkan bahwa keputusan taktis bukanlah tindakan tunggal, melainkan proses berulang yang terus diperbarui seiring perubahan situasi lapangan. Keunggulan perwira di lapangan sangat ditentukan oleh kecepatan dan ketepatan dalam menyelesaikan siklus ini dibandingkan pihak lain yang terlibat dalam situasi tersebut.</p> <p>Aktifitas tersebut mencakup :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Observe</i> (observasi): mengumpulkan data mentah dari sekitar (apa yang terlihat dan terdengar).</li> <li>b. <i>Orient</i> (orientasi): menganalisis data berdasarkan pengalaman, budaya, dan pengetahuan untuk memahami makna situasi (kontekstualisasi).</li> <li>c. <i>Decide</i> (memutuskan): memilih satu tindakan dari beberapa opsi yang tersedia.</li> <li>d. <i>Act</i> (bertindak): mengeksekusi keputusan tersebut dan segera memantau hasilnya untuk memulai siklus observasi baru.</li> </ol> <p>Dengan demikian, pengambilan keputusan taktis merupakan perpaduan antara kompetensi kognitif, pengalaman operasional, ketajaman situasional, dan integritas profesional.</p> <p>2. Prinsip Pengambilan Keputusan Taktis</p> <p>Agar keputusan taktis memiliki kualitas dan legitimasi, terdapat beberapa prinsip fundamental yang harus menjadi landasan bagi setiap perwira Polri.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ketepatan tindakan, tempat, dan waktu (<i>the right action, at the right place, at the right time</i>). <p>Keputusan yang benar secara prosedural dapat menjadi tidak efektif apabila diambil pada waktu yang keliru atau pada posisi taktis yang salah. Oleh karena itu, momentum dan penempatan menjadi bagian integral dari kualitas keputusan.</p> </li> <li>b. Diskresi kepolisian yang bertanggung jawab. <p>Diskresi memberikan ruang bagi perwira untuk mengambil keputusan berdasarkan penilaian</p> </li> </ol>
--	--

	<p>profesional ketika hukum tidak mengatur secara rinci situasi lapangan. Namun, diskresi harus dibatasi oleh kepentingan umum, kewajiban hukum, serta asas kewajaran dan proporsionalitas. Diskresi yang tidak terkendali justru berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan.</p> <p>c. Legalitas dan akuntabilitas.</p> <p>Setiap keputusan taktis harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum, secara administratif dalam rantai komando, maupun secara moral kepada publik. Prinsip ini memastikan bahwa tindakan kepolisian tidak hanya efektif, tetapi juga sah dan dapat diterima oleh masyarakat.</p> <p>d. Keselamatan personel (<i>officer safety</i>).</p> <p>Keselamatan anggota merupakan prioritas yang tidak dapat ditawar. Tidak ada keberhasilan tugas yang sebanding dengan hilangnya nyawa atau luka berat pada personel. Oleh karena itu, setiap keputusan harus mempertimbangkan mitigasi risiko terhadap anggota tanpa mengabaikan kewajiban perlindungan kepada masyarakat.</p> <p>Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai kompas etik dan profesional dalam setiap pengambilan keputusan taktis.</p> <p><b>B. Model Pengambilan Keputusan Taktis</b></p> <p>Dalam praktik kepolisian, pengambilan keputusan taktis umumnya menggunakan dua model utama yang saling melengkapi, yaitu model analitis dan model intuitif.</p> <p>1. Model Rasional atau Analitis</p> <p>Model rasional atau analitis merupakan pendekatan pengambilan keputusan yang menekankan proses berpikir sistematis, logis, dan berurutan. Dalam model ini, perwira bertindak sebagai analis yang secara sadar menimbang berbagai informasi sebelum menentukan tindakan.</p> <p>Tahapan utama dalam model rasional meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber yang relevan.</li> <li>b. Analisis situasi untuk memahami permasalahan, potensi ancaman, serta tujuan yang ingin dicapai.</li> </ol>
--	---

	<p>c. Perumusan beberapa alternatif tindakan yang mungkin dilakukan.</p> <p>d. Penilaian risiko dan manfaat dari setiap alternatif.</p> <p>e. Pemilihan opsi terbaik yang memberikan manfaat paling besar dengan risiko paling kecil.</p> <p>f. Perencanaan pelaksanaan serta mekanisme pengendalian dan evaluasi.</p> <p>Model ini sangat efektif digunakan dalam situasi yang relatif stabil, dapat diprediksi, dan memiliki waktu yang cukup untuk perencanaan. Keunggulan model rasional terletak pada ketepatan perhitungan, kelengkapan pertimbangan, serta kuatnya dasar akuntabilitas keputusan.</p> <p>Contoh penerapan:</p> <p>Dalam perencanaan pengamanan konser musik berskala besar, perwira melakukan pemetaan lokasi, analisis jumlah penonton, identifikasi titik rawan, penghitungan kebutuhan personel, serta simulasi skenario gangguan Kamtibmas. Berdasarkan analisis tersebut, ditetapkan pola pengamanan, penempatan personel, dan prosedur penanganan situasi darurat. Keputusan diambil bukan secara spontan, melainkan melalui kajian yang matang.</p> <p>Namun demikian, keterbatasan model rasional adalah ketergantungannya pada waktu dan kelengkapan informasi. Dalam situasi lapangan yang berubah cepat, model ini sulit diterapkan secara penuh.</p> <p>2. Model Intuitif (<i>Recognition Primed Decision/RPD</i>)</p> <p>Model intuitif atau Recognition Primed Decision (RPD) merupakan pendekatan yang dominan digunakan dalam situasi taktis yang dinamis, penuh tekanan, dan minim waktu. Model ini bertumpu pada kemampuan perwira untuk mengenali pola situasi berdasarkan pengalaman dan pembelajaran sebelumnya.</p> <p>Dalam model RPD, perwira tidak membandingkan banyak alternatif secara formal. Ketika menghadapi suatu situasi, otak secara cepat mencocokkan kondisi tersebut dengan pengalaman yang pernah dialami. Jika pola dikenali, maka satu tindakan yang paling masuk akal langsung muncul sebagai respons utama. Tindakan tersebut kemudian diuji secara mental dalam waktu singkat:</p>
--	---

	<p>apakah aman, legal, dan mungkin dilaksanakan. Jika dianggap layak, keputusan segera dieksekusi.</p> <p>Intuisi dalam konteks ini bukanlah tebakan acak, melainkan hasil dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengalaman operasional berulang.</li> <li>Pelatihan yang konsisten.</li> <li>Evaluasi dari keberhasilan dan kegagalan masa lalu.</li> </ol> <p>Contoh penerapan:</p> <p>Seorang perwira di lapangan melihat massa mulai bergerak maju, suara provokatif meningkat, dan jarak dengan objek vital semakin dekat. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, perwira mengenali pola awal eskalasi kerusuhan. Tanpa menyusun berbagai alternatif secara formal, perwira langsung memerintahkan penguatan barisan, penggunaan pengeras suara untuk peringatan persuasif, dan penempatan personel di titik tertentu untuk memutus konsentrasi massa. Keputusan diambil dalam hitungan detik, namun didasarkan pada pola yang telah dikenali sebelumnya.</p> <p>Kelemahan model intuitif muncul apabila perwira minim pengalaman atau keliru mengenali pola, sehingga berpotensi menghasilkan keputusan yang bias.</p> <p>Baik model rasional maupun model intuitif memerlukan kemampuan berpikir kritis sebagai penguat kualitas keputusan. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk tetap objektif, sadar diri, dan rasional di tengah tekanan situasi.</p> <p>Berpikir kritis memungkinkan perwira untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengendalikan emosi dan tidak bereaksi secara impulsif.</li> <li>Mengevaluasi kembali asumsi awal yang mungkin keliru.</li> <li>Menyadari keterbatasan informasi yang dimiliki.</li> <li>Menghindari bias kognitif seperti <i>overconfidence</i> atau prasangka pribadi.</li> </ol> <p>Dalam praktiknya, berpikir kritis berfungsi sebagai rem dan penyeimbang. Pada model rasional, berpikir kritis mencegah analisis yang terlalu kaku dan tidak adaptif. Pada model intuitif, berpikir kritis membantu menguji apakah intuisi yang muncul benar-benar relevan dan proporsional.</p>
--	---

	<p>Contoh penerapan:</p> <p>Dalam situasi tegang, seorang perwira merasakan dorongan kuat untuk segera membubarkan massa secara represif. Namun melalui berpikir kritis, perwira mempertanyakan asumsi tersebut: apakah massa sudah benar-benar anarkis, apakah masih ada ruang komunikasi, dan apakah tindakan keras justru akan memperburuk situasi. Dengan demikian, keputusan yang diambil menjadi lebih terukur dan bertanggung jawab.</p> <p>Model rasional dan model intuitif bukanlah pendekatan yang saling bertentangan, melainkan saling melengkapi. Perwira yang profesional adalah perwira yang mampu menggunakan model rasional saat waktu memungkinkan, mengandalkan intuisi terlatih saat situasi menuntut kecepatan, serta memperkuat keduanya dengan berpikir kritis. Kombinasi inilah yang menghasilkan keputusan taktis yang akurat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p><b>C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Akurasi Pengambilan Keputusan Taktis</b></p> <p>Akurasi pengambilan keputusan taktis dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang saling berinteraksi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tekanan Waktu <p>Situasi taktis sering kali menuntut keputusan dalam hitungan detik. Semakin sempit waktu yang tersedia, semakin tinggi beban kognitif yang dialami perwira. Dalam kondisi ini, kemampuan menyaring informasi penting dan mengabaikan gangguan menjadi sangat menentukan.</p> </li> <li>2. Ketidakpastian dan Kualitas Informasi (<i>Fog of War</i>) <p>Informasi lapangan sering tidak lengkap, simpang siur, atau bertentangan. Perwira dituntut mampu mengambil keputusan terbaik berdasarkan informasi yang tersedia, tanpa menunggu kepastian sempurna yang justru dapat memperburuk situasi.</p> </li> <li>3. Penilaian Tingkat Ancaman dan Risiko <p>Keputusan yang tepat sangat bergantung pada kemampuan perwira dalam membedakan ancaman laten dan ancaman nyata, serta memprediksi eskalasi situasi apabila tindakan tertentu diambil atau ditunda.</p> </li> <li>4. Ketersediaan Sumber Daya dan Kapabilitas</li> </ol>
--	---

	<p>Setiap keputusan harus mempertimbangkan jumlah personel, perlengkapan, dukungan, serta kemampuan taktis yang tersedia. Keputusan yang tidak realistis justru dapat meningkatkan risiko kegagalan dan korban.</p> <p>5. Kompetensi dan Kondisi Psikologis Pengambil Keputusan</p> <p>Tingkat pengalaman, pelatihan, kelelahan, stres, serta kestabilan emosi sangat memengaruhi kejernihan berpikir dan ketepatan penilaian. Perwira yang terlatih dan mampu mengelola tekanan cenderung menghasilkan keputusan yang lebih akurat dan proporsional.</p> <p>Pengambilan keputusan taktis merupakan inti profesionalisme perwira Polri di lapangan. Keputusan yang akurat lahir dari pemahaman konsep yang kuat, penerapan prinsip yang konsisten, penggunaan model yang tepat sesuai situasi, serta kemampuan mengelola faktor-faktor yang memengaruhi keputusan. Dengan penguasaan aspek-aspek tersebut, perwira Polri diharapkan mampu bertindak cepat, tepat, dan bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.</p> <p><b>D. Pilar Kualitas Keputusan: Legalitas, Akuntabilitas, dan Officer Safety</b></p> <p>Kualitas pengambilan keputusan taktis tidak hanya diukur dari keberhasilan operasional semata, tetapi juga dari keabsahan hukum, pertanggungjawaban, dan perlindungan terhadap keselamatan personel. Oleh karena itu, setiap keputusan taktis harus berlandaskan pada tiga pilar utama, yaitu legalitas melalui diskresi kepolisian, akuntabilitas, dan keselamatan personel.</p> <p>1. Prinsip Diskresi Kepolisian (Legalitas Keputusan)</p> <p>Diskresi kepolisian merupakan kewenangan yang melekat pada perwira Polri untuk mengambil keputusan berdasarkan penilaian profesionalnya sendiri demi kepentingan umum, khususnya dalam situasi lapangan yang tidak diatur secara rinci oleh peraturan perundang-undangan. Prinsip ini lahir dari kenyataan bahwa hukum bersifat umum dan tidak mungkin mengantisipasi seluruh variasi kejadian di lapangan.</p> <p>Melalui diskresi, perwira diberikan ruang untuk bertindak cepat, adaptif, dan kontekstual tanpa harus menunggu instruksi formal yang justru dapat memperburuk situasi. Namun demikian, diskresi bukan kebebasan tanpa</p>
--	--

	<p>batas. Penggunaannya harus memenuhi tiga batasan utama, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bertujuan untuk kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.</li> <li>b. Tidak bertentangan dengan kewajiban hukum, termasuk norma hukum, HAM, dan prosedur kepolisian.</li> <li>c. Masuk akal dan proporsional, yaitu seimbang antara tingkat ancaman dan tindakan yang diambil.</li> </ol> <p>Contoh penerapan:</p> <p>Dalam situasi kemacetan parah akibat kecelakaan lalu lintas, perwira di lapangan memutuskan membuka jalur khusus yang seharusnya tertutup untuk umum guna mempercepat evakuasi korban dan mencegah penumpukan massa. Keputusan ini merupakan bentuk diskresi yang sah karena bertujuan melindungi keselamatan publik, tidak melanggar prinsip hukum, dan dilakukan secara proporsional.</p> <p>Diskresi yang dijalankan secara tepat memperkuat legitimasi tindakan kepolisian, sedangkan diskresi yang keliru berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum dan penurunan kepercayaan publik.</p> <p>2. Aspek Akuntabilitas Keputusan</p> <p>Akuntabilitas merupakan prinsip bahwa setiap keputusan dan tindakan kepolisian harus dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas memastikan bahwa kewenangan yang dimiliki perwira tidak disalahgunakan dan tetap berada dalam koridor hukum dan etika profesi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Akuntabilitas internal. <p>Akuntabilitas internal berkaitan dengan tanggung jawab perwira terhadap rantai komando dan mekanisme pengawasan institusi. Setiap keputusan taktis, terutama yang berdampak besar, harus dilaporkan secara resmi kepada atasan sesuai prosedur yang berlaku, termasuk kepada fungsi pengawasan internal seperti Propam apabila diperlukan.</p> <p>Pelaporan ini bukan sekadar formalitas administratif, tetapi sarana evaluasi untuk memastikan bahwa keputusan diambil secara profesional, proporsional, dan sesuai dengan standar operasional.</p> </li> </ol>
--	---

	<p>Contoh penerapan:</p> <p>Setelah mengambil keputusan membubarkan massa dengan tindakan tertentu, perwira menyusun laporan kronologis yang memuat dasar pertimbangan, kondisi lapangan, serta langkah-langkah yang diambil. Laporan ini menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada pimpinan dan bahan evaluasi institusi.</p> <p>b. Akuntabilitas publik</p> <p>Selain kepada institusi, perwira juga bertanggung jawab kepada masyarakat dan hukum. Akuntabilitas publik diwujudkan melalui transparansi informasi, keterbukaan terhadap pemeriksaan hukum, serta kesiapan mempertanggungjawabkan tindakan di hadapan pengadilan apabila diperlukan.</p> <p>Akuntabilitas publik penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa tindakan kepolisian dapat diterima secara sosial dan hukum.</p> <p>Contoh penerapan:</p> <p>Dalam kasus penggunaan kekuatan yang mendapat sorotan publik, kepolisian memberikan penjelasan resmi melalui media, menyampaikan fakta secara proporsional, serta membuka ruang bagi proses hukum apabila terdapat dugaan pelanggaran.</p> <p>3. Keselamatan Personel (<i>Officer Safety</i>)</p> <p>Keselamatan personel merupakan pilar fundamental dalam setiap pengambilan keputusan taktis. Prinsip ini menegaskan bahwa tidak ada keberhasilan operasi yang sebanding dengan hilangnya nyawa atau luka berat pada anggota. Oleh karena itu, setiap keputusan harus dirancang untuk meminimalkan risiko terhadap keselamatan petugas.</p> <p>Prinsip <i>officer safety</i> menuntut perwira untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menghindari tindakan yang tidak perlu dan berisiko tinggi.</li> <li>b. Memastikan penggunaan perlengkapan keselamatan yang memadai.</li> <li>c. Mengatur taktik dan formasi yang melindungi personel.</li> <li>d. Menghentikan atau mengubah operasi apabila risiko menjadi tidak terkendali.</li> </ol>
--	--

	<p>Namun demikian, keselamatan personel tidak berarti mengabaikan tugas perlindungan masyarakat. Tantangan utama perwira adalah menyeimbangkan perlindungan terhadap anggota dengan kewajiban menjaga keselamatan publik.</p> <p>Contoh penerapan:</p> <p>Dalam pengejaran pelaku bersenjata di area pemukiman padat, perwira memutuskan untuk menunggu penguatan dan melakukan pengepungan terukur daripada melakukan pengejaran langsung yang berisiko tinggi. Keputusan ini diambil untuk melindungi keselamatan anggota dan warga sekitar, meskipun membutuhkan waktu lebih lama.</p> <p>Legalitas melalui diskresi, akuntabilitas, dan keselamatan personel merupakan tiga pilar yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan dalam pengambilan keputusan taktis. Keputusan yang efektif namun tidak legal, atau legal tetapi mengorbankan keselamatan personel, tetap merupakan keputusan yang tidak berkualitas. Perwira Polri yang profesional adalah perwira yang mampu menyeimbangkan ketiga pilar ini dalam setiap tindakan di lapangan.</p>
--	---

## POKOK BAHASAN 2

### DASAR PENGAMBILAN KEPUTUSAN

#### A. Analisis Situasi Cepat (*Rapid Situation Assessment*)

Kemampuan membaca situasi merupakan keterampilan indrawi sekaligus kognitif yang sangat menentukan kualitas pengambilan keputusan seorang perwira Polri. Keterampilan ini tidak hanya bertumpu pada data teknis, tetapi juga pada kepekaan sosial, empati budaya, dan intuisi profesional. Dalam praktik lapangan, analisis situasi yang cepat dan akurat menuntut perpaduan antara informasi faktual, pemahaman konteks sosial, serta kemampuan menafsirkan tanda-tanda awal eskalasi atau perubahan dinamika.

Perwira yang mampu membaca situasi dengan baik akan lebih siap menentukan tindakan yang tepat, proporsional, dan berorientasi pada pencegahan konflik.

##### 1. Teknik Observasi: Dari Konvensional ke Modern

Untuk memperoleh gambaran situasi yang utuh, Polri tidak hanya mengandalkan pengamatan kasat mata, tetapi menggunakan berbagai teknik observasi yang berkembang dari pendekatan konvensional hingga modern, yang banyak mengadopsi metode dalam penelitian sosial.

##### a. Observasi partisipan (Konvensional/Antropologis)

Observasi partisipan dilakukan dengan cara terlibat langsung dalam kehidupan sosial masyarakat, baik secara terbuka maupun tersamar. Peran ini sering dijalankan oleh Bhabinkamtibmas atau personel intelijen yang berinteraksi langsung dengan warga.

Tujuan utama observasi partisipan adalah untuk memahami “suhu emosi” masyarakat, norma sosial, nilai budaya, serta cara pandang warga terhadap suatu isu. Pemahaman ini penting agar tindakan kepolisian tidak bertentangan dengan nilai lokal dan tidak memicu resistensi atau kesalahpahaman budaya.

Contoh penerapan:

Seorang Bhabinkamtibmas yang rutin hadir dalam kegiatan keagamaan atau adat setempat dapat merasakan perubahan sikap warga—misalnya dari

	<p>netral menjadi resah. Informasi ini menjadi sinyal awal potensi konflik, jauh sebelum muncul laporan resmi.</p> <p>b. Pemetaan sosial (pendekatan sosiologis)</p> <p>Pemetaan sosial bertujuan untuk mengidentifikasi struktur kekuatan sosial di suatu wilayah. Analisis ini mencakup siapa tokoh formal dan informal yang berpengaruh, kelompok mana yang dominan, serta relasi antar kelompok yang harmonis atau berpotensi konflik.</p> <p>Melalui pemetaan sosial, perwira dapat menentukan aktor kunci yang dapat dijadikan mitra dialog maupun pihak yang perlu diantisipasi sebagai potensi hambatan.</p> <p>Contoh penerapan:</p> <p>Dalam konflik antar kelompok pemuda, pemetaan sosial membantu perwira mengenali tokoh yang paling didengar oleh masing-masing pihak, sehingga pendekatan persuasif dapat dilakukan secara tepat sasaran dan efektif.</p> <p>c. Penginderaan jauh (<i>remote sensing</i>)</p> <p>Perkembangan teknologi memungkinkan penggunaan <i>drone</i> atau <i>Unmanned Aerial Vehicle (UAV)</i> sebagai alat observasi taktis. Penginderaan jauh memberikan perspektif visual dari udara yang tidak dapat diperoleh melalui pengamatan darat.</p> <p>Teknik ini sangat berguna untuk memantau pergerakan massa, kepadatan kerumunan, jalur evakuasi, serta titik-titik rawan secara real-time.</p> <p>Contoh penerapan:</p> <p>Dalam pengamanan unjuk rasa besar, pemantauan melalui drone memungkinkan perwira melihat pergeseran massa dan potensi titik penumpukan yang dapat memicu keributan, sehingga langkah pencegahan dapat segera dilakukan.</p> <p>d. Analisis digital (<i>cyber-social mapping</i>)</p> <p>Di era digital, dinamika sosial sering kali bermula dari ruang siber. Oleh karena itu, Polri menggunakan analisis media sosial dan sumber terbuka (OSINT) untuk memantau tren percakapan, narasi provokatif, dan mobilisasi opini.</p>
--	--

	<p>Analisis digital membantu mendeteksi apakah suatu isu sedang “digoreng” atau dimanipulasi oleh kelompok tertentu sebelum berkembang menjadi konflik nyata di lapangan.</p> <p>Contoh penerapan:</p> <p>Lonjakan percakapan bernada provokatif di media sosial tentang suatu kebijakan publik dapat menjadi indikator awal potensi aksi massa, sehingga langkah pencegahan dapat disiapkan lebih dini.</p> <p>2. Logika “<i>What is Going On?</i>” (Fakta) vs “<i>What is the Threat?</i>” (Ancaman)</p> <p>Kemampuan membaca situasi tidak berhenti pada pengumpulan data, tetapi menuntut kemampuan membedakan antara fakta dan ancaman. Kesalahan umum dalam pengambilan keputusan taktis adalah menyamakan fakta dengan ancaman.</p> <p>a. Fakta: “<i>What is Going On?</i>”</p> <p>Fakta adalah realitas objektif yang ditemukan di lapangan. Fakta bersifat netral dan belum tentu berbahaya. Seorang perwira harus mampu mengidentifikasi fakta apa adanya tanpa dibebani asumsi atau emosi.</p> <p>Dalam menganalisis fakta, perwira dapat menggunakan logika SWOT, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>Strength</i> (Kekuatan): keunggulan yang dimiliki aparat,</li> <li>2) <i>Weakness</i> (Kelemahan): keterbatasan internal,</li> <li>3) <i>Opportunity</i> (Peluang): kesempatan untuk mengendalikan situasi,</li> <li>4) <i>Threat</i> (Ancaman): potensi bahaya yang dapat menggagalkan tujuan.</li> </ol> <p>b. Ancaman: “<i>What is the Threat?</i>”</p> <p>Ancaman merupakan hasil analisis terhadap fakta yang memiliki potensi merusak keselamatan, ketertiban, atau tujuan operasi. Tidak semua fakta otomatis menjadi ancaman; ancaman muncul ketika fakta tertentu berinteraksi dengan kelemahan dan faktor risiko lainnya.</p> <p>Ilustrasi konkret:</p>
--	---

Fakta menunjukkan terdapat kerumunan sekitar 1.000 orang di suatu lokasi. Fakta ini sendiri bersifat netral. Namun setelah dianalisis menggunakan SWOT, ditemukan bahwa lokasi berupa jalan sempit (*weakness*) dan terdapat individu provokator di tengah massa (*threat*). Dari analisis tersebut, ancaman nyata bukan semata jumlah massa, melainkan potensi terjadinya stamping (saling injak) yang dapat menimbulkan korban jiwa.

Dengan logika ini, perwira dapat mengarahkan keputusan pada mitigasi ancaman yang sebenarnya, bukan sekadar bereaksi terhadap fakta permukaan.

## **B. Identifikasi Dan Perumusan Akar Permasalahan Utama**

Keberhasilan suatu operasi kepolisian sangat ditentukan oleh ketepatan dalam mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan utama. Kesalahan pada tahap ini akan berakibat pada kesalahan strategi dan tindakan di lapangan. Dalam banyak kasus, kegagalan operasi bukan disebabkan oleh kurangnya sumber daya, melainkan karena aparat hanya merespons gejala yang tampak di permukaan, tanpa menyentuh akar permasalahan yang sebenarnya.

Oleh karena itu, perwira Polri dituntut memiliki kemampuan analitis untuk membedakan antara apa yang terlihat dan apa yang menjadi penyebab mendasar dari suatu gangguan Kamtibmas.

### 1. Gejala (*Symptoms*) dan Akar Masalah (*Root Cause*)

#### a. Gejala (*Symptoms*)

Gejala merupakan manifestasi fisik atau peristiwa nyata yang tampak di lapangan dan mudah diamati. Gejala sering kali menjadi pemicu respons cepat aparat karena bersifat kasat mata dan menimbulkan gangguan langsung terhadap ketertiban umum.

Namun, gejala bukanlah masalah inti, melainkan tanda atau sinyal bahwa terdapat persoalan yang lebih dalam.

Contoh gejala:

- 1) balap liar setiap malam minggu.
- 2) tawuran antar pelajar.
- 3) kerumunan remaja hingga larut malam.

	<p>4) aksi vandalisme di fasilitas umum.</p> <p>Gejala cenderung berulang apabila ditangani secara reaktif tanpa analisis lanjutan.</p> <p>b. Akar masalah (<i>root cause</i>).</p> <p>Akar masalah adalah penyebab mendasar yang melatarbelakangi munculnya gejala. Akar masalah sering bersifat struktural, sosial, budaya, atau psikologis, sehingga tidak selalu terlihat secara langsung.</p> <p>Mengidentifikasi akar masalah membutuhkan pendekatan analitis dan empatik, termasuk pemahaman terhadap konteks sosial masyarakat setempat.</p> <p>Contoh akar masalah dari balap liar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) kurangnya ruang ekspresi dan penyaluran hobi bagi pemuda.</li> <li>2) tidak tersedianya sirkuit atau arena resmi.</li> <li>3) lemahnya pengawasan orang tua.</li> <li>4) pengaruh kelompok sebaya dan pencarian identitas diri.</li> <li>5) minimnya kegiatan positif di lingkungan sekitar.</li> </ol> <p>Akar masalah inilah yang harus disentuh agar solusi yang diberikan bersifat berkelanjutan, bukan sekadar sementara.</p> <p>c. Hubungan antara gejala dan akar masalah</p> <p>Gejala dan akar masalah memiliki hubungan sebab–akibat. Gejala adalah sinyal, sedangkan akar masalah adalah sumber gangguan yang sesungguhnya. Penanganan yang hanya berfokus pada gejala ibarat memangkas ranting tanpa mencabut akar.</p> <p>Ilustrasi operasional:</p> <p>Jika polisi hanya membubarkan balap liar (gejala), maka para pelaku akan berpindah ke lokasi lain atau mengulang kembali pada waktu berbeda. Namun, jika aparat bersama pemangku kepentingan mengelola komunitas pemuda, membina klub otomotif resmi, atau memfasilitasi arena balap yang aman (menyentuh akar), maka perilaku balap liar dapat ditekan secara signifikan dan permanen.</p>
--	---

	<p>Dengan demikian, kemampuan membedakan gejala dan akar masalah menjadi kunci dalam merancang strategi yang efektif dan berorientasi pencegahan.</p> <p>2. Teknik Merumuskan Masalah Operasi</p> <p>Setelah akar masalah teridentifikasi, tantangan berikutnya adalah menentukan masalah mana yang harus ditangani terlebih dahulu. Tidak semua masalah dapat diselesaikan secara bersamaan karena keterbatasan waktu, personel, dan sumber daya.</p> <p>Untuk itu, perwira dapat menggunakan Analisis USG (<i>Urgency, Seriousness, Growth</i>) sebagai alat bantu perumusan prioritas masalah operasional.</p> <p>a. <i>Urgency</i> (tingkat kedesakan).</p> <p><i>Urgency</i> mengukur seberapa mendesak suatu masalah harus segera ditangani. Masalah dengan urgensi tinggi biasanya berpotensi menimbulkan dampak langsung dalam waktu dekat.</p> <p>Contoh:</p> <p>Aksi tawuran yang sedang berlangsung memiliki urgensi lebih tinggi dibandingkan parkir liar yang masih dapat dikendalikan sementara.</p> <p>b. <i>Seriousness</i> (tingkat keseriusan dampak).</p> <p><i>Seriousness</i> berkaitan dengan tingkat keparahan dampak yang ditimbulkan terhadap keamanan, keselamatan jiwa, ketertiban umum, dan stabilitas sosial.</p> <p>Contoh:</p> <p>Balap liar yang berpotensi menyebabkan korban jiwa memiliki tingkat keseriusan lebih tinggi dibandingkan pelanggaran administratif ringan.</p> <p>c. <i>Growth</i> (potensi perkembangan masalah).</p> <p><i>Growth</i> menilai seberapa cepat dan luas masalah akan berkembang apabila tidak segera ditangani. Masalah dengan potensi eskalasi tinggi harus menjadi perhatian utama.</p> <p>Contoh:</p> <p>Konflik antar kelompok pemuda yang dibiarkan dapat berkembang menjadi konflik antar kampung dan melibatkan senjata tajam.</p>
--	--

d. Ilustrasi penerapan analisis USG.

Di suatu wilayah terdapat dua permasalahan:

- 1) tawuran antar kelompok pemuda.
- 2) parkir liar di sekitar pasar.

Hasil analisis USG menunjukkan bahwa tawuran memiliki tingkat urgency tinggi, seriousness tinggi, dan growth tinggi, karena berpotensi menimbulkan korban jiwa dan konflik lanjutan. Sementara parkir liar memiliki dampak yang relatif terbatas dan tidak berkembang cepat.

Berdasarkan analisis tersebut, tawuran ditetapkan sebagai permasalahan utama yang harus ditangani terlebih dahulu, sedangkan parkir liar dapat ditangani secara bertahap.

Identifikasi dan perumusan permasalahan utama merupakan fondasi dalam pengambilan keputusan taktis. Perwira yang mampu membedakan gejala dan akar masalah, serta menetapkan prioritas melalui analisis USG, akan menghasilkan kebijakan dan tindakan yang lebih tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan. Kesalahan pada tahap ini akan membuat operasi bersifat reaktif, boros sumber daya, dan berpotensi gagal mencapai tujuan Kamtibmas.

**C. Perumusan Asumsi Operasional dan Kendala**

Dalam pengambilan keputusan dan perencanaan operasi kepolisian, data dan informasi yang tersedia di lapangan hampir tidak pernah lengkap. Situasi inilah yang menuntut perwira untuk tidak hanya mengumpulkan fakta, tetapi juga mengisi celah informasi secara cerdas melalui perumusan asumsi operasional serta mengidentifikasi kendala yang membatasi ruang gerak operasi. Kedua aspek ini menjadi elemen krusial agar rencana yang disusun tetap realistis, adaptif, dan dapat dilaksanakan.

1. Menetapkan Asumsi Operasional

a. Hakikat dan fungsi asumsi operasional.

Asumsi operasional merupakan dugaan logis yang dibuat secara sadar untuk menjembatani kekosongan informasi (intelligence gap) dalam suatu operasi. Asumsi bukan spekulasi sembarangan, melainkan kesimpulan sementara yang disusun berdasarkan pengalaman, pola kejadian sebelumnya, dan pengetahuan profesional.

	<p>Fungsi utama asumsi operasional adalah memungkinkan proses perencanaan tetap berjalan, meskipun data yang dimiliki belum sepenuhnya lengkap atau terverifikasi. Tanpa asumsi, perencanaan akan terhenti dan keputusan akan tertunda, yang justru dapat meningkatkan risiko operasional.</p> <p>Asumsi yang baik harus memenuhi kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) masuk akal dan realistis, tidak berlebihan maupun meremehkan situasi.</li> <li>2) berbasis pengalaman dan pola kejadian yang pernah terjadi.</li> <li>3) dapat diuji dan diperbarui, seiring masuknya informasi baru.</li> </ol> <p>b. Contoh penerapan asumsi operasional.</p> <p>Ilustrasi operasional:</p> <p>Dalam perencanaan penggerebekan markas sindikat narkoba, belum terdapat kepastian 100% apakah pelaku memiliki senjata api atau sistem pengawasan elektronik. Namun, berdasarkan pengalaman pada kasus serupa, perwira menetapkan asumsi bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pelaku kemungkinan memiliki senjata api untuk melindungi aktivitas ilegalnya;</li> <li>2) lokasi dilengkapi CCTV atau alat pemantau sederhana.</li> </ol> <p>Berdasarkan asumsi tersebut, perencana operasi menyiapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) rompi antipeluru bagi personel.</li> <li>2) formasi taktis yang meminimalkan paparan risiko.</li> <li>3) unit pendukung untuk menonaktifkan sistem elektronik.</li> </ol> <p>Apabila asumsi ini terbukti benar, personel siap menghadapi ancaman. Apabila ternyata keliru, persiapan tersebut tetap meningkatkan faktor keselamatan dan tidak merugikan operasi. Inilah prinsip “better safe than sorry” dalam perumusan asumsi operasional.</p> <p>c. Risiko asumsi yang keliru</p>
--	--

Meskipun penting, asumsi yang tidak diuji atau terlalu bias dapat berbahaya. Asumsi yang berlebihan dapat menyebabkan penggunaan kekuatan yang tidak proporsional, sedangkan asumsi yang meremehkan dapat membahayakan keselamatan personel. Oleh karena itu, perwira harus terus mengevaluasi dan menyesuaikan asumsi selama operasi berlangsung.

#### **D. Analisis dan Identifikasi Kendala dan Batasan (Hukum, SDM, Logistik) yang Mungkin Dihadapi Dalam Operasi**

##### **1. Hakikat Kendala dalam Operasi**

Kendala adalah batasan objektif yang tidak dapat diabaikan dan harus dikelola dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan operasi. Kendala menentukan apa yang boleh, apa yang tidak boleh, dan apa yang mungkin dilakukan. Mengabaikan kendala akan menghasilkan rencana yang ideal secara teoritis, namun gagal secara praktis.

Perwira yang profesional tidak menutup mata terhadap keterbatasan, melainkan mengakui dan mengelolanya secara jujur.

##### **2. Jenis-Jenis Kendala Operasional**

###### **a. Batasan Hukum**

Batasan hukum merupakan kendala paling fundamental. Setiap tindakan kepolisian harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Kapolri.

Contoh:

Pengeledahan hanya dapat dilakukan dengan surat perintah, kecuali dalam kondisi tertangkap tangan. Penggunaan kekuatan juga harus sesuai dengan prinsip legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas.

###### **b. Batasan Sumber Daya Manusia (SDM)**

Ketersediaan dan kondisi personel sangat memengaruhi pilihan taktis. Personel yang terbatas jumlahnya atau mengalami kelelahan fisik dan mental akan menurunkan efektivitas operasi.

Contoh:

Setelah melaksanakan pengamanan kegiatan besar selama berjam-jam, personel mengalami

	<p>kelelahan sehingga perwira harus menyesuaikan pola operasi dan tidak memaksakan tindakan berisiko tinggi.</p> <p>c. Batasan logistik</p> <p>Logistik mencakup perlengkapan, kendaraan, amunisi non-mematikan, bahan bakar, serta sistem komunikasi. Kekurangan logistik dapat membatasi opsi tindakan di lapangan.</p> <p>Contoh:</p> <p>Keterbatasan gas air mata atau rusaknya alat komunikasi mengharuskan perwira mengandalkan pendekatan persuasif dan komunikasi langsung, bukan tindakan represif.</p> <p>d. Batasan geografis dan lingkungan</p> <p>Kondisi geografis dan lingkungan sering kali menjadi kendala signifikan, seperti medan berat, cuaca ekstrem, atau kepadatan pemukiman.</p> <p>Contoh:</p> <p>Operasi di wilayah rawa atau pegunungan memerlukan penyesuaian taktik dan waktu. Demikian pula operasi di pemukiman padat menuntut kehati-hatian ekstra untuk menghindari korban sipil.</p> <p>Dengan demikian, analisis lingkungan operasional bukan sekadar kegiatan mengumpulkan data, melainkan proses “membedah kenyataan” untuk menemukan variabel-variabel kritis yang menentukan keberhasilan operasi. Perwira yang andal adalah mereka yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mampu membedakan gejala dan akar masalah,</li> <li>Menetapkan asumsi operasional yang cerdas untuk menutup celah informasi,</li> <li>Secara jujur mengidentifikasi dan mengelola kendala hukum, SDM, logistik, dan geografis.</li> </ol> <p>Pendekatan ini menghasilkan rencana yang realistis, adaptif, dan dapat dilaksanakan, bukan sekadar rencana yang tampak sempurna di atas kertas namun rapuh di lapangan.</p> <p><b>E. Pengembangan Opsi Tindakan Pilihan</b></p> <p>Mengembangkan opsi tindakan pilihan merupakan tahap krusial dalam proses pengambilan keputusan operasional kepolisian. Pada tahap ini, perwira tidak hanya dituntut mampu</p>
--	---

	<p>berpikir kreatif dan analitis, tetapi juga realistis, dengan mempertimbangkan ancaman, tujuan operasi, kendala hukum, SDM, logistik, serta keselamatan personel dan masyarakat. Opsi tindakan adalah berbagai kemungkinan cara bertindak yang dapat dipilih untuk mencapai tujuan operasi, bukan sekadar satu rencana tunggal.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hakikat Opsi Tindakan (<i>Courses of Action – COA</i>)       <p>Opsi tindakan adalah alternatif strategi atau taktik yang disusun untuk menjawab permasalahan utama yang telah diidentifikasi. Setiap opsi harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Berorientasi pada tujuan operasi.</li> <li>b. Dapat dilaksanakan (<i>feasible</i>).</li> <li>c. Sesuai hukum (<i>acceptable</i>).</li> <li>d. Sejalan dengan kebijakan pimpinan.</li> <li>e. Memperhitungkan risiko dan dampak lanjutan.</li> </ol> <p>Perwira yang hanya memiliki satu opsi sebenarnya belum melakukan analisis; ia baru membuat keputusan prematur.</p> </li> <li>2. Prinsip Pengembangan Opsi Tindakan       <p>Dalam mengembangkan opsi tindakan, perwira perlu berpegang pada prinsip-prinsip berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Variatif dan kontras.           <p>Opsi harus benar-benar berbeda satu sama lain (misalnya persuasif, preventif, represif terbatas), bukan hanya variasi kecil dari satu pendekatan.</p> </li> <li>b. Proporsional.           <p>Setiap opsi harus seimbang antara tingkat ancaman dan kekuatan yang digunakan.</p> </li> <li>c. Berjenjang.           <p>Opsi disusun dari tingkat risiko dan dampak terendah hingga tertinggi.</p> </li> <li>d. Mengutamakan pencegahan           <p>Opsi yang mengedepankan pencegahan dan de-eskalasi harus selalu dipertimbangkan lebih dahulu.</p> </li> </ol> </li> <li>3. Langkah Sistematis Mengembangkan Opsi Tindakan       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menetapkan tujuan operasional yang jelas.</li> </ol> </li> </ol>
--	---

	<p>Opsi tindakan harus menjawab pertanyaan: “Apa yang ingin dicapai?”</p> <p>Contoh tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) mencegah bentrokan massa.</li> <li>2) menangkap pelaku kejahatan.</li> <li>3) menjaga kelancaran kegiatan masyarakat.</li> </ol> <p>Tanpa tujuan yang jelas, opsi tindakan akan kehilangan arah.</p> <p>b. Menyusun beberapa alternatif tindakan.</p> <p>Minimal dikembangkan 3–4 opsi tindakan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) opsi preventif–persuasif. <p>Menitikberatkan pada pencegahan melalui pendekatan komunikasi dan kehadiran polisi.</p> <p>Contoh:</p> <p>Dalam potensi tawuran antar kelompok pemuda:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) patroli dialogis.</li> <li>b) pendekatan tokoh masyarakat.</li> <li>c) pembubaran secara persuasif.</li> </ol> <p>Kelebihan: Risiko rendah, menjaga kepercayaan publik.</p> <p>Keterbatasan: Kurang efektif jika eskalasi cepat.</p> </li> <li>2) opsi pengamanan terbatas (<i>containment</i>). <p>Mengendalikan situasi dengan membatasi ruang gerak tanpa konfrontasi langsung.</p> <p>Contoh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) penutupan akses jalan tertentu.</li> <li>b) penempatan personel di titik rawan.</li> <li>c) penggunaan barikade <i>portable</i>.</li> </ol> <p>Kelebihan: Mengisolasi potensi konflik.</p> <p>Keterbatasan: Membutuhkan personel dan logistik cukup.</p> </li> <li>3) opsi penindakan terukur.</li> </ol>
--	---

	<p>Penggunaan kewenangan penegakan hukum secara selektif dan terkontrol.</p> <p>Contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) penangkapan provokator utama.</li> <li>b) penyitaan senjata tajam.</li> <li>c) penegakan hukum berbasis bukti.</li> </ul> <p>Kelebihan: Efek jera dan pemulihan kontrol.</p> <p>Keterbatasan: Risiko eskalasi dan sorotan publik.</p> <p>4) opsi tindakan tegas (<i>last resort</i>).</p> <p>Digunakan hanya jika situasi mengancam keselamatan jiwa atau stabilitas serius.</p> <p>Contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) pengendalian massa sesuai SOP.</li> <li>b) penggunaan kekuatan bertahap dan proporsional.</li> </ul> <p>Kelebihan: Menghentikan ancaman serius.</p> <p>Keterbatasan: Risiko hukum, citra, dan keselamatan tinggi.</p> <p>4. Analisis Risiko dan Konsekuensi Setiap Opsi</p> <p>Setiap opsi harus dianalisis dengan pertanyaan kunci:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Apa risiko terhadap personel?</li> <li>b. Apa dampak terhadap masyarakat?</li> <li>c. Apakah sesuai dengan hukum dan HAM?</li> <li>d. Apa konsekuensi jangka pendek dan panjang?</li> </ul> <p>Contoh:</p> <p>Menangkap provokator di tengah massa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Risiko personel: tinggi.</li> <li>b. Dampak publik: bisa positif atau memicu kemarahan.</li> <li>c. Alternatif: penangkapan tertutup pasca kejadian</li> </ul> <p>5. Penyusunan Matriks Opsi Tindakan</p> <p>Perwira profesional sering menggunakan matriks sederhana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Opsi SDM      efektivitas      risiko      legalitas      kebutuhan kelayakan.</li> </ul>
--	---

	<p>b. Matriks ini membantu pimpinan memilih opsi secara objektif, bukan emosional.</p> <p>6. Integrasi <i>Officer Safety</i> dan Akuntabilitas</p> <p>Setiap opsi harus diuji dengan dua pertanyaan akhir:</p> <p>a. Apakah opsi ini melindungi keselamatan anggota?</p> <p>b. Apakah opsi ini dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan publik?</p> <p>Jika jawabannya “tidak”, maka opsi tersebut harus dimodifikasi atau dieliminasi.</p> <p>Mengembangkan opsi tindakan pilihan adalah proses berpikir strategis dan taktis yang menuntut kedewasaan profesional seorang perwira. Opsi yang baik bukan yang paling keras, melainkan yang paling tepat, paling aman, dan paling dapat dipertanggungjawabkan. Dengan memiliki beberapa opsi yang matang, perwira memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi terhadap dinamika lapangan tanpa kehilangan kendali situasi.</p> <p><b>F. Analisis dan Pemilihan Opsi Terbaik</b></p> <p>Setelah berbagai opsi tindakan dikembangkan, tahap selanjutnya adalah menganalisis dan memilih opsi terbaik. Tahap ini merupakan inti dari pengambilan keputusan taktis, karena pada titik inilah perwira menentukan tindakan yang paling tepat, bukan yang paling mudah atau paling cepat.</p> <p>1. Tujuan Analisis Opsi</p> <p>Analisis opsi bertujuan untuk:</p> <p>a. Menilai kelayakan setiap opsi.</p> <p>b. Mengukur risiko dan dampak yang mungkin timbul.</p> <p>c. Memastikan keputusan sesuai hukum, proporsional, dan akuntabel.</p> <p>d. Memilih tindakan yang paling efektif dengan risiko terkendali.</p> <p>Keputusan yang baik bukanlah keputusan tanpa risiko, melainkan keputusan dengan risiko yang disadari, dihitung, dan dikelola.</p> <p>2. Kriteria Analisis Opsi Tindakan</p> <p>Setiap opsi dianalisis menggunakan kriteria berikut:</p> <p>a. Kesesuaian dengan tujuan operasi.</p>
--	---

	<p>Apakah opsi tersebut benar-benar menjawab permasalahan utama dan mendukung tujuan operasi? Contoh:</p> <p>Jika tujuan operasi adalah mencegah korban jiwa, maka opsi yang berpotensi memicu bentrokan terbuka harus dieliminasi.</p> <p>b. Legalitas dan kepatuhan SOP. Opsi harus sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) peraturan perundang-undangan.</li> <li>2) Perkap dan SOP penggunaan kekuatan.</li> <li>3) prinsip HAM dan diskresi kepolisian.</li> </ol> <p>Opsi yang efektif tetapi melanggar hukum tidak boleh dipilih.</p> <p>c. Risiko terhadap <i>officer safety</i>. Analisis harus mempertimbangkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ancaman terhadap keselamatan personel.</li> <li>2) tingkat kelelahan anggota.</li> <li>3) ketersediaan perlindungan (alat, dukungan medis).</li> </ol> <p>Prinsipnya: keberhasilan operasi tidak boleh dibayar dengan nyawa anggota.</p> <p>d. Dampak terhadap masyarakat dan citra Polri. Setiap keputusan taktis memiliki implikasi sosial:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) apakah memicu keresahan?</li> <li>2) apakah berpotensi viral dan menurunkan kepercayaan publik?</li> <li>3) apakah memperkuat legitimasi Polri?</li> </ol> <p>e. Kelayakan sumber daya. Opsi terbaik adalah opsi yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) dapat dilaksanakan dengan SDM tersedia.</li> <li>2) didukung logistik dan sarana yang memadai.</li> <li>3) sesuai kondisi geografis dan waktu.</li> </ol> <p>3. Pemilihan Opsi Terbaik</p>
--	---

	<p>Setelah dianalisis, perwira memilih opsi dengan nilai keseluruhan terbaik, bukan sekadar yang paling agresif atau paling aman secara pribadi.</p> <p>Biasanya, opsi terpilih:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Berada di tengah spektrum (tidak terlalu lunak, tidak terlalu keras)</li> <li>b. Memiliki opsi cadangan (<i>contingency plan</i>) jika situasi berubah</li> <li>c. Dapat disesuaikan secara dinamis di lapangan.</li> </ol> <p>Contoh Studi Kasus Berbasis Skenario Operasi Polri Skenario:</p> <p>Menjelang tengah malam, Polsek menerima laporan adanya kerumunan ±300 pemuda di perbatasan dua kelurahan yang sering terlibat tawuran. Informasi intelijen menyebutkan adanya provokator dan kemungkinan senjata tajam. Personel yang tersedia hanya 20 orang, cuaca hujan, dan wilayah berupa jalan sempit permukiman padat.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tujuan operasi.       <ol style="list-style-type: none"> <li>1) mencegah terjadinya tawuran.</li> <li>2) melindungi masyarakat dan personel.</li> <li>3) mengamankan provokator tanpa eskalasi.</li> </ol> </li> <li>b. Opsi tindakan.       <ol style="list-style-type: none"> <li>1) opsi 1 – preventif persuasif.           <ol style="list-style-type: none"> <li>a) patroli dialogis.</li> <li>b) pendekatan tokoh setempat.</li> </ol> </li> <li>2) opsi 2 – containment terbatas.           <ol style="list-style-type: none"> <li>a) menutup akses jalan.</li> <li>b) memecah konsentrasi massa.</li> </ol> </li> <li>3) opsi 3 – penindakan selektif.           <ol style="list-style-type: none"> <li>a) penangkapan provokator secara cepat.</li> </ol> </li> </ol> </li> <li>c. Analisis opsi.       <ol style="list-style-type: none"> <li>1) opsi 1: risiko rendah, tetapi kurang efektif karena massa sudah terkonsentrasi.</li> <li>2) opsi 3: efektif, tetapi risiko tinggi bagi personel dan berpotensi memicu tawuran.</li> </ol> </li> </ol>
--	--

	<p>3) opsi 2: risiko moderat, dapat mencegah bentrokan, sesuai jumlah personel.</p> <p>d. Opsi terpilih.</p> <p>Opsi 2 (<i>containment terbatas</i>) Didukung pendekatan persuasif dan kesiapan opsi penindakan selektif jika eskalasi meningkat.</p> <p>Keputusan ini menunjukkan keseimbangan antara efektivitas, legalitas, dan keselamatan personel.</p> <p>Tahap analisis dan pemilihan opsi terbaik menuntut kedewasaan berpikir, keberanian moral, dan tanggung jawab profesional. Keputusan taktis yang baik tidak hanya menyelesaikan masalah hari ini, tetapi juga mencegah masalah yang lebih besar di masa depan serta menjaga kehormatan institusi Polri.</p> <p><b>G. Pengembangan dan Evaluasi Pilihan Aksi I (COA)</b></p> <p>1. Perancangan Pilihan Aksi (<i>Courses of Action - COA</i>)</p> <p>COA adalah skema tindakan yang mungkin dilakukan untuk mencapai misi. Seorang perwira harus menghindari "visi tunggal" dan wajib menyediakan minimal tiga opsi untuk memberikan ruang diskresi yang sehat.</p> <p>a. Spektrum opsi tindakan.</p> <p>1) opsi ringan (<i>pendekatan soft power</i>):</p> <p>Menitikberatkan pada komunikasi, negosiasi, dan himbauan. Contoh, menghadapi pedagang kaki lima yang menutup jalan, perwira memilih melakukan dialog bersama tokoh pedagang dan memberikan solusi relokasi sementara (Preemptif).</p> <p>2) opsi sedang (pendekatan preventif-regulatif):</p> <p>Menggunakan kehadiran fisik dan barikade untuk membatasi ruang gerak tanpa kontak fisik langsung. Contoh, Pemasangan water barrier dan penggelaran personel berseragam untuk memisahkan dua kelompok massa yang bersitegang guna mencegah gesekan (Preventif).</p> <p>3) opsi keras (<i>pendekatan hard power</i>):</p>
--	--

	<p>Tindakan tegas berupa penegakan hukum atau penggunaan kekuatan sesuai prosedur. Contoh, Melakukan penggerebekan dan upaya paksa terhadap markas kelompok kriminal bersenjata yang telah membahayakan nyawa warga (Represif).</p> <p>b. Integrasi prinsip HAM dan manajemen risiko.</p> <p>Setiap COA wajib diuji melalui dua filter utama:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Prinsip HAM Mendasar: Merujuk pada UUD 1945, UU No. 39/1999 tentang HAM, Perkap No. 8/2009, serta Universal Declaration of Human Rights (PBB). Prinsip utamanya adalah <i>necessity</i> (keperluan), <i>proportionality</i> (keseimbangan), dan <i>legality</i> (legalitas). Tidak boleh ada penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia demi tujuan operasi.</li> <li>2) Kaitan dengan Manajemen Risiko: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) opsi ringan memiliki risiko kegagalan tugas yang tinggi jika lawan bersifat agresif.</li> <li>b) opsi keras memiliki risiko pelanggaran HAM dan kerugian reputasi institusi yang sangat tinggi.</li> <li>c) perwira harus menghitung: "apakah risiko yang saya ambil sebanding dengan nyawa atau keamanan publik yang saya lindungi?"</li> </ol> </li> </ol> <p>2. Simulasi Mental dan Wargaming Sederhana</p> <p>Sebelum memutuskan, perwira melakukan simulasi di kepala (<i>mental rehearsal</i>) atau diskusi cepat di atas peta.</p> <p>a. Teknik memprediksi hasil: aksi vs reaksi.</p> <p>Prediksi harus menggunakan kacamata sosiologis dan psikologis:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) frame sosiologis: memahami struktur sosial. Jika polisi menangkap tokoh agama (aksi A), reaksi masyarakat bisa berupa solidaritas massa yang besar (reaksi B).</li> <li>2) frame psikologis: memahami emosi manusia. Jika petugas berteriak dengan nada mengancam pada orang yang sedang stres (aksi A), lawan</li> </ol>
--	---

	<p>mungkin akan bereaksi "lawan atau lari" (<i>fight or flight</i>) secara membabi buta (reaksi B).</p> <p>3) kombinasi sosiologis dan psikologis:</p> <p>Dalam kerumunan suporter, polisi memilih tidak menggunakan gas air mata di ruang tertutup (aksi A) karena secara psikologis akan memicu kepanikan massal (<i>mass panic</i>) yang mengakibatkan orang saling injak (reaksi B).</p> <p>b. Menilai keuntungan dan kerugian secara cepat.</p> <p>Gunakan metode matriks perbandingan. Perwira menilai setiap opsi berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) seberapa besar kemungkinan berhasil?</li> <li>2) berapa banyak personel yang terancam bahaya?</li> <li>3) berapa besar potensi dampak negatifnya?</li> </ol> <p>c. Pilihan COA terbaik.</p> <p>Setelah simulasi, perwira memilih satu opsi yang paling optimal berdasarkan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) efektivitas (mencapai tujuan): Apakah opsi ini benar-benar menyelesaikan akar masalah? Contoh, Membubarkan tawuran dengan gas air mata efektif membubarkan massa saat itu, tapi mediasi antar tokoh kampung lebih efektif mencegah tawuran berulang.</li> <li>2) efisiensi (hemat sumber daya): Menggunakan kekuatan secukupnya untuk hasil maksimal. Contoh, Menggunakan 5 personel intelijen untuk menangkap pelaku di rumahnya (efisien) daripada mengerahkan 1 kompi Brimob di tengah pasar yang bisa memicu kekacauan (tidak efisien).</li> <li>3) akuntabilitas (legal): Apakah tindakan ini bisa saya pertanggungjawabkan di sidang pengadilan atau di depan media? Contoh, Penangkapan berdasarkan alat bukti yang sah (Akuntabel) vs penangkapan hanya berdasarkan kecurigaan tanpa prosedur (Tidak Akuntabel).</li> </ol>
--	--

	<p>d. Pengambilan Keputusan Akhir dan Pemberian Perintah.</p> <p>Ini adalah momen peralihan dari Berpikir ke Bertindak.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) pengambilan keputusan akhir: perwira memilih COA dengan keyakinan penuh dan menerima tanggung jawab atas risikonya.</li><li>2) pemberian perintah: instruksi harus jelas, singkat, dan menggunakan format yang baku (seperti format 5 paragraf/POLEK). Perintah mencakup: Siapa melakukan apa, di mana, kapan, dan bagaimana koordinasinya.</li></ol> <p>Dengan demikian, Pengembangan COA adalah seni mengelola spektrum antara pendekatan humanis dan tindakan tegas. Seorang perwira Sespimma tidak boleh hanya mahir merancang aksi, tetapi juga harus mampu memprediksi reaksi sosial-psikologis dari tindakan tersebut. Dengan mengintegrasikan prinsip HAM ke dalam manajemen risiko, keputusan yang diambil bukan hanya akan efektif secara taktis, tetapi juga memiliki legitimasi moral dan hukum yang kuat.</p>
--	---

**POKOK BAHASAN 3**  
**PERANCANGAN SKENARIO DAN**  
**MEKANISME KOMANDO PENGENDALIAN (C2)**

**A. Penyusunan Skenario Taktis dan Rencana Operasi (Ren Ops)**

Rencana Operasi (Ren Ops) adalah dokumen hukum dan panduan taktis bagi seluruh personel. Dokumentasi ini harus komprehensif agar tidak terjadi salah tafsir di lapangan.

1. Jabaran Format Standar Polri

a. Latar belakang (situasi):

Menjelaskan landasan hukum, data intelijen terakhir, kekuatan lawan, dan kondisi lingkungan operasional. Di sini juga dijelaskan "mengapa" operasi ini perlu dilakukan.

b. Tugas pokok:

Rumusan singkat namun padat tentang "Siapa, Melakukan Apa, Kapan, di Mana, dan Mengapa (Tujuan)". Ini adalah inti dari misi.

c. Pelaksanaan:

Bagian paling teknis yang merinci fase-fase operasi, pembagian tugas per unit/satgas, serta koordinasi antar fungsi.

d. Administrasi dan logistik:

Mengatur dukungan banlog (makanan, BBM), dukungan kesehatan, anggaran, hingga prosedur pelaporan barang bukti.

e. Komando dan pengendalian:

Menjelaskan struktur pimpinan, saluran komunikasi, dan sandi-sandi yang digunakan.

2. Visualisasi Skenario: Spasial dan Temporal

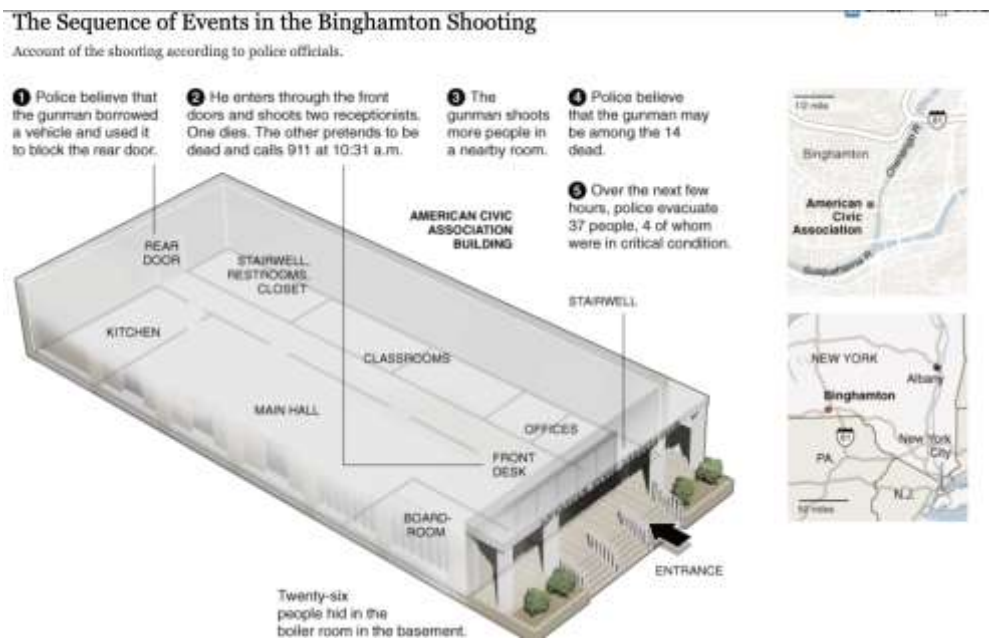
Agar rencana mudah dipahami dalam tekanan, perwira harus menyusun visualisasi:

a. Peta pergerakan (spasial):

Menunjukkan penempatan kekuatan secara geografis.

1) Elemen:

Titik kumpul (*starting point*), rute infiltrasi, Buffer Zone (ring pengamanan), posisi sasaran, dan jalur evakuasi medis. Visualisasi ini membantu personel memahami posisi kawan dan lawan secara ruang.



2) Urutan tindakan/*sequence of events (timeline)*:

Variabel: Waktu (H-Hour/D-Day), jenis tindakan, unit pelaksana, dan ambang batas risiko.

Contoh: Menit ke-0: Infiltrasi Intelijen; Menit ke-15: Penyekatan jalur oleh Sabhara; Menit ke-30: Upaya paksa oleh Reskrim.

Contoh dapat dilihat di tabel berikut:

Waktu (T-Hour)	Fase Operasi	Jenis Tindakan / Kegiatan	Unit Pelaksana	Ambang Batas Risiko ( <i>Risk Threshold</i> )
H - 120 Menit	Persiapan	<i>Final Briefing</i> dan pengecekan perlengkapan (senpi, rompi, alat komunikasi).	Seluruh Unit (Intel, Reskrim, Sabhara)	Personel tidak lengkap >10% atau alat komunikasi utama rusak.

<b>H - 60 Menit</b>	<b>Infiltrasi</b>	Penempatan agen di sekitar TKP untuk memantau keberadaan target dan aktivitas warga.	Unit Intelkam	Terdeteksi oleh lawan (penyamaran terbongkar).
<b>H - 15 Menit</b>	<b>Penyekatan</b>	Penutupan akses jalan keluar-masuk pemukiman dan pengalihan arus lalu lintas.	Unit Sabhara / Lantas	Adanya perlawanan massa dalam jumlah besar di barikade.
<b>H - 05 Menit</b>	<b>Posisi Siaga</b>	Unit pemukul menempati titik tumpu ( <i>entry point</i> ) di depan bangunan sasaran.	Unit Reskrim (Opsnal)	Terjadi kebocoran info (target terlihat melarikan diri sebelum serbu).
<b>H - 00 (D-Day)</b>	<b>Eksekusi</b>	Upaya paksa (pendobrakan), pelumpuhan target, dan pengamanan barang bukti.	Unit Reskrim	Perlawanan senjata api dari dalam bangunan sasaran.
<b>H + 10 Menit</b>	<b>Konsolidasi</b>	<i>Body search</i> , sterilisasi TKP, dan evakuasi target ke kendaraan taktis.	Unit Reskrim dan Sabhara	Target terluka parah atau adanya ancaman bom di lokasi.
<b>H + 30 Menit</b>	<b>Terminasi</b>	Penarikan pasukan secara bertahap dan pemberian penjelasan singkat ke pengurus lingkungan (RT/RW).	Unit Binmas dan Sabhara	Provokasi massa yang menghambat proses penarikan pasukan.

Penjelasan variabel dalam tabel:

a) waktu (T-hour/H-hour):  
memberikan kerangka waktu yang ketat agar antarunit memiliki sinkronisasi yang presisi.

	<p>b) fase operasi: mengelompokkan tindakan dalam tahapan logis (persiapan s/d pengakhiran).</p> <p>c) unit pelaksana: memperjelas prinsip who does what (siapa melakukan apa) untuk menghindari tumpang tindih fungsi.</p> <p>d) ambang batas risiko (<i>risk threshold</i>): Ini adalah bagian terpenting bagi perwira. Ini adalah indikator "Kapan operasi harus dihentikan atau diubah modulusnya". Jika kondisi di kolom ini terjadi, pimpinan harus segera mengambil keputusan kontinjensi (<i>plan B</i>).</p> <p><b>B. Skenario Taktis (Peta Pergerakan, Penempatan Kekuatan, Urutan Tindakan) yang Detail dan Mudah Dipahami Oleh Anggota</b></p> <p>Skenario taktis adalah pedoman visual dan operasional bagi seluruh personel tentang siapa bergerak ke mana, melakukan apa, kapan, dan bagaimana. Skenario yang baik menghilangkan ambiguitas, mempercepat respons, dan mencegah kesalahan fatal di lapangan.</p> <p>1. Peta Pergerakan (<i>Movement Plan</i>)</p> <p>a. Tujuan peta pergerakan.</p> <p>Peta pergerakan disusun untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) mengarahkan arus pergerakan personel dan kendaraan</li> <li>2) menghindari tabrakan tugas (<i>overlapping</i>)</li> <li>3) mengendalikan massa dan menutup potensi eskalasi</li> <li>4) menjamin jalur aman bagi personel dan masyarakat</li> </ol> <p>b. Komponen utama peta pergerakan.</p> <p>Peta pergerakan wajib sederhana, simbolik, dan mudah dibaca, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) titik kumpul (<i>assembly point</i>).</li> </ol>
--	--

	<p>Lokasi awal personel sebelum bergerak. Contoh: Halaman Polsek atau lapangan terbuka.</p> <p>2) rute pergerakan. Jalur masuk dan keluar personel (<i>inbound-outbound</i>).</p> <p>3) area operasi. Zona inti tempat potensi gangguan terjadi.</p> <p>4) zona penyangga (<i>buffer zone</i>). Area pengaman antara massa dan objek vital.</p> <p>5) jalur evakuasi. Jalur khusus untuk penarikan personel, evakuasi korban, atau mundur taktis.</p> <p>c. Contoh narasi operasional. “Seluruh personel berangkat dari Titik Kumpul Polsek pukul 22.30 WIB. Tim Dalmas bergerak melalui Jalan Utama A, sedangkan Tim Patroli Bermotor menggunakan Jalan Alternatif B untuk menghindari konsentrasi massa.”</p> <p>2. Penempatan Kekuatan (<i>Force Deployment</i>)</p> <p>a. Prinsip penempatan. Penempatan kekuatan harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) berlapis (<i>layered security</i>).</li> <li>2) fleksibel dan mudah digerakkan.</li> <li>3) proporsional terhadap ancaman.</li> </ol> <p>b. Pembagian kekuatan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) unsur depan (<i>leading element</i>). <ol style="list-style-type: none"> <li>a) fungsi: deteksi dini dan pendekatan persuasif.</li> <li>b) personel: patroli Sabhara / Bhabinkamtibmas.</li> <li>c) posisi: titik terdepan dekat massa</li> </ol> </li> <li>2) unsur pengendali (<i>main force</i>). <ol style="list-style-type: none"> <li>a) fungsi: pengendalian situasi.</li> <li>b) personel: dalmas awal / unit Samapta.</li> </ol> </li> </ol>
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>c) posisi: buffer zone.</li> <li>3) unsur cadangan (<i>reserve force</i>). <ul style="list-style-type: none"> <li>a) fungsi: intervensi cepat jika eskalasi meningkat.</li> <li>b) personel: dalmas lanjutan / unit taktis.</li> <li>c) posisi: titik aman tersembunyi.</li> </ul> </li> <li>4) unsur pendukung <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Intel: pengamatan provokator.</li> <li>b) Lalu lintas: rekayasa arus.</li> <li>c) medis: siaga evakuasi.</li> <li>d) Humas: dokumentasi dan komunikasi publik.</li> </ul> </li> <li>c. Contoh penempatan <p>“Dalmas awal ditempatkan di Simpang Jalan X sebagai penghalang utama. Tim intel menyebar secara tertutup di sekitar kerumunan. Cadangan berada di halaman sekolah Y.”</p> </li> <li>3. Urutan Tindakan (<i>Sequence of Actions</i>) <p>Urutan tindakan disusun berjenjang dan berbasis eskalasi, sehingga anggota memahami apa yang harus dilakukan tanpa menunggu perintah ulang.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tahap 1 – persiapan. <ul style="list-style-type: none"> <li>1) apel pengecekan personel.</li> <li>2) penjelasan singkat skenario dan aturan penggunaan kekuatan.</li> <li>3) pembagian tugas dan sektor.</li> <li>4) pengecekan perlengkapan.</li> </ul> </li> <li>b. Tahap 2 – pendekatan awal (de-eskalasi). <ul style="list-style-type: none"> <li>1) kehadiran polisi secara terbuka</li> <li>2) himbauan lisan dan dialog</li> <li>3) pemisahan kelompok yang berpotensi bentrok</li> </ul> </li> <li>c. Tahap 3 – pengendalian terbatas. <ul style="list-style-type: none"> <li>1) penutupan akses jalan.</li> <li>2) penghalauan massa secara pasif.</li> <li>3) penangkapan selektif jika diperlukan.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
--	--

	<p>d. Tahap 4 – tindakan tegas terukur (jika eskalasi).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) penggunaan kekuatan sesuai SOP.</li> <li>2) penarikan provokator.</li> <li>3) perlindungan objek vital.</li> </ol> <p>e. Tahap 5 – konsolidasi dan penarikan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) penyisiran area.</li> <li>2) evakuasi korban jika ada.</li> <li>3) penarikan personel secara tertib.</li> <li>4) laporan awal situasi.</li> </ol> <p>4. Bahasa Perintah yang Jelas dan Seragam</p> <p>Skenario taktis harus menggunakan bahasa perintah sederhana, misalnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. “Tahan posisi”</li> <li>b. “Maju terbatas”</li> <li>c. “Tarik mundur teratur”</li> <li>d. “Amankan target”</li> </ol> <p>Hindari istilah ambigu yang dapat ditafsirkan berbeda oleh anggota.</p> <p>5. Visualisasi Sederhana untuk Anggota</p> <p>Agar mudah dipahami:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Gunakan sketsa peta sederhana.</li> <li>b. Warna berbeda untuk tiap unsur.</li> <li>c. Simbol panah untuk pergerakan.</li> <li>d. Nomor urutan tindakan.</li> </ol> <p>Prinsipnya: anggota harus paham skenario dalam waktu 5 menit penjelasan.</p> <p>Skenario taktis yang baik bukan yang paling rumit, melainkan yang paling jelas, realistis, dan mudah dieksekusi. Ketika situasi berubah cepat dan tekanan meningkat, anggota tidak berpikir panjang—mereka bergerak berdasarkan skenario yang telah dipahami bersama.</p> <p>6. Contoh Skenario Taktis</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Contoh skenario taktis dalam bentuk tabel. <ol style="list-style-type: none"> <li>1) skenario:</li> </ol> </li> </ol>
--	---

Potensi tawuran antar kelompok pemuda di perbatasan Kelurahan A dan B pada malam hari.

Tujuan Operasi:

- a) mencegah terjadinya bentrokan.
- b) mengamankan provokator.
- c) menjaga keselamatan masyarakat dan personel.

2) tabel skenario taktis operasi

Tahap	Situasi	Unsur Terlibat	Penempatan Kekuatan	Tindakan Utama
1	Pra-operasi	Seluruh personel	Titik Kumpul Polsek	Apel, briefing singkat, cek perlengkapan
2	Massa mulai berkumpul	Patroli Sabhara, Intel	Jalan masuk wilayah	Observasi, deteksi provokator
3	Massa terkonsentrasi	Dalmas Awal	Buffer zone (simpang jalan)	Himbauan, pembatasan ruang gerak
4	Potensi eskalasi	Dalmas Lanjutan	Area cadangan tersembunyi	Siaga intervensi cepat
5	Provokator teridentifikasi	Reskrim + Intel	Sisi massa	Penangkapan selektif
6	Situasi terkendali	Seluruh unsur	Area operasi	Penyisiran dan konsolidasi
7	Pasca operasi	Perwira pengendali	Titik aman	Penarikan dan laporan awal

b. Contoh Sketsa Peta Pergerakan (Sederhana dan Operasional)

Catatan: Sketsa ini bersifat ilustratif, dapat digambar ulang di papan tulis, kertas plano, atau *slide briefing*.



	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) masuk lebih awal melalui jalan alternatif.</li> <li>2) mengamati dan melaporkan dinamika.</li> </ol> <p>b. Dalmas awal.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) menempati buffer zone.</li> <li>2) menutup jalur pertemuan dua kelompok.</li> </ol> <p>c. Dalmas cadangan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) menunggu di titik aman.</li> <li>2) bergerak hanya atas perintah.</li> </ol> <p>d. Penindakan selektif.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) provokator diamankan dari sisi massa.</li> <li>2) dilakukan cepat untuk mencegah reaksi.</li> </ol> <p>e. Penarikan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) massa membubarkan diri.</li> <li>2) personel ditarik bertahap.</li> </ol> <p>Contoh Narasi Singkat untuk Briefing Anggota</p> <p>“Rekan-rekan, kita bergerak dari Polsek pukul 22.30. Patroli dan intel masuk lebih dulu melalui Jalan Alternatif. Dalmas menutup simpang sebagai buffer zone. Cadangan tetap di halaman sekolah. Fokus kita mencegah bentrok, bukan mencari konflik. Jika provokator teridentifikasi, tim khusus bergerak cepat. Keselamatan anggota adalah prioritas.”</p> <p><b>C. Mekanisme Komando dan Pengendalian (<i>Command and Control - C2</i>)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan Rantai Komando <p>Rantai komando memastikan setiap personel tahu kepada siapa mereka bertanggung jawab dan dari siapa mereka menerima perintah.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Prinsip <i>unity of command</i>: satu orang hanya menerima perintah dari satu atasan langsung dalam satu waktu untuk menghindari kebingungan.</li> <li>b. Mekanisme: pimpinan operasi (Kapolsek/Kasat) -&gt; Perwira Pengendali Lapangan (Padal) -&gt; Anggota Pelaksana. Komunikasi bersifat hierarkis untuk perintah taktis, namun bisa bersifat koordinatif untuk pertukaran info antar unit di lapangan.</li> </ol> </li> </ol>
--	---

	<p>2. Sistem Komunikasi: Radio vs Digital</p> <p>a. HT (Radio): Tetap menjadi pilihan utama karena kecepatan transmisi real-time dan ketahanan sinyal di medan tertentu. Namun, rentan disadap jika tidak menggunakan frekuensi terenkripsi.</p> <p>b. Aplikasi Digital (HP): Sangat berguna untuk pengiriman data visual (foto/video/lokasi GPS).</p> <p>1) kelayakan: layak digunakan untuk koordinasi non-taktis.</p> <p>2) bahaya: sangat membahayakan jika digunakan untuk perintah serbu/taktis rahasia karena risiko delay sinyal, kebocoran data melalui penyadapan internet, atau HP yang berbunyi/bercahaya saat operasi penyamaran. Penggunaan harus dibatasi pada aplikasi end-to-end encryption.</p> <p>3. Mekanisme SITREP (Situation Report)</p> <p>Pelaporan situasi dilakukan secara periodik (misal setiap 30 menit) atau saat terjadi perubahan situasi signifikan. SITREP yang mendalam menggunakan format SALUTE: <i>Size</i> (Jumlah lawan), <i>Activity</i> (Kegiatan lawan), <i>Location</i> (Posisi), <i>Unit</i> (Identitas lawan), <i>Time</i> (Waktu), <i>Equipment</i> (Persenjataan lawan).</p> <p><b>D. Perancangan Prosedur Kontinjensi (Plan B)</b></p> <p>1. Identifikasi Skenario Terburuk (<i>Worst-case Scenario</i>)</p> <p>Gunakan metode "What-If Analysis". Misalnya, ilustrasi Penangkapan Narkoba di Kosan:</p> <p>a. Rencana utama: menangkap pelaku saat tidur.</p> <p>b. Skenario terburuk: pelaku ternyata menyandera penghuni kos lain atau membakar barang bukti sekaligus menyiram petugas dengan bensin.</p> <p>2. Perumusan Rencana Cadangan (<i>Contingency Plan</i>)</p> <p>Jika COA utama gagal karena skenario terburuk muncul, Plan B otomatis aktif tanpa perlu perencanaan ulang dari nol. Misalnya, Kedalaman Plan B: Harus menentukan "Pemicu" (Trigger). Misalnya: "Jika terjadi penyanderaan, unit penindak mundur dan unit negosiator/Brimob segera masuk sebagai prioritas utama."</p> <p>3. Prosedur Evakuasi dan Penguatan Darurat</p>
--	---

	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Evakuasi: Menetapkan titik jemput aman (Pick-up Point) bagi personel yang terluka atau jika situasi tidak terkendali (Aborted Mission).</li><li>b. Penguatan (Reinforcement): Menyiapkan unit cadangan yang bersiaga di radius 5-10 menit dari lokasi untuk melakukan back-up jika terjadi perlawanan massa atau eskalasi mendadak.</li></ul> <p>Pengambilan keputusan teknis-taktis bukanlah bakat, melainkan keterampilan yang dilatih melalui penguasaan analisis situasi, manajemen risiko, dan ketajaman intuisi. Keberhasilan operasi ditentukan oleh kemampuan perwira dalam merancang skenario yang fleksibel namun tetap terkendali dalam sistem komando yang jelas. Rencana yang baik adalah rencana yang mampu beradaptasi saat kontak pertama dengan lapangan, dengan tetap menjaga keselamatan personel dan akuntabilitas hukum institusi Polri.</p>
--	--



## RANGKUMAN

1. Pengambilan keputusan taktis merupakan kemampuan perwira Polri dalam menentukan tindakan cepat dan tepat di lapangan, yang berbeda dari keputusan strategis (kebijakan jangka panjang) dan operasional (pengelolaan sumber daya wilayah). Keputusan taktis berfokus pada respon langsung terhadap situasi nyata dan harus memenuhi kriteria kualitas, yaitu cepat, tepat sasaran, legal, profesional, dan akuntabel.

Keputusan taktis dilandasi prinsip legalitas, proporsionalitas, diskresi kepolisian, keselamatan personel (*officer safety*), dan tanggung jawab publik. Dalam praktiknya, perwira menggunakan model pengambilan keputusan analitis untuk situasi yang relatif stabil dan memiliki waktu cukup, serta model intuitif (*Recognition Primed Decision/RPD*) untuk kondisi darurat yang menuntut respons cepat. Kedua model tersebut diperkuat dengan kemampuan berpikir kritis agar keputusan tetap objektif dan tidak dipengaruhi emosi maupun bias.


2. Dasar keputusan yang akurat adalah analisis situasi cepat (*Rapid Situation Assessment*) yang memadukan informasi intelijen dan data lapangan. Perwira harus mampu membedakan antara gejala yang tampak dan akar permasalahan yang sesungguhnya, sehingga tindakan yang diambil tidak hanya bersifat reaktif, tetapi menyelesaikan masalah secara mendasar.

Dalam kondisi keterbatasan informasi, perwira menetapkan asumsi operasional yang logis dan berbasis pengalaman untuk menjembatani kekosongan data. Selain itu, dilakukan analisis terhadap kendala dan batasan operasi, meliputi aspek hukum, keterbatasan sumber daya manusia, logistik, waktu, dan kondisi geografis. Berdasarkan analisis tersebut, perwira kemudian mengembangkan beberapa opsi tindakan pilihan yang variatif, proporsional, dan realistis sebagai bahan penentuan keputusan terbaik.

3. Keputusan taktis yang baik harus dituangkan dalam Rencana Operasi (Ren Ops) yang disusun sesuai format standar Polri, meliputi latar belakang, tugas pokok, pelaksanaan, administrasi, dan komando. Ren Ops tersebut kemudian dijabarkan ke dalam skenario taktis yang memuat peta pergerakan, penempatan kekuatan, serta urutan tindakan yang jelas dan mudah dipahami oleh seluruh anggota.

Keberhasilan pelaksanaan operasi sangat ditentukan oleh sistem komando dan pengendalian (*command and control*) yang tegas, jalur komunikasi utama yang jelas, serta mekanisme pelaporan cepat dari lapangan. Untuk mengantisipasi dinamika dan perubahan situasi, perwira juga harus menyiapkan prosedur

	kontinjensi (rencana B) agar operasi tetap terkendali meskipun menghadapi kondisi yang tidak terduga.
--	---

	<p><b>LATIHAN</b></p>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jelaskan perbedaan keputusan strategis, operasional, dan taktis dalam kepolisian serta analisis mengapa keputusan taktis menuntut kecepatan dan akurasi yang lebih tinggi di lapangan.</li> <li>2. Analisis tahapan analisis situasi dalam pengambilan keputusan taktis dengan menekankan pentingnya membedakan gejala dan akar permasalahan, serta peran asumsi operasional dan kendala dalam menentukan opsi tindakan.</li> <li>3. Uraikan hubungan antara penyusunan Rencana Operasi (Ren Ops), skenario taktis, dan sistem Komando dan Pengendalian (<i>command and control</i>) dalam menjamin keberhasilan operasi kepolisian di lapangan.</li> </ol>